

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS

Fara Merian Sari

Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso KM.8 Rumbai Pekanbaru

Abstrak : Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas di Kota Pekanbaru (studi kasus Kelurahan Tuah Karya) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini nanti nya antara lain, Pertama : untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penerapan teori yang didapat penulis. Kedua : untuk menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas, sebagai pertimbangan dan masukan bagi instansi terkait dan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik atau permasalahan yang sama.

Kata Kunci : Kebijakan, implementasi kebijakan dan program konversi minyak tanah.

Abstract : *This research is intended to find out which programme execution to gas conversion kerosene in the city of Pekanbaru (a case study of village of Tuah Karya) and the factors that influence the implementation of any Convention program ground to gas oil. As for the benefits that can be taken from the results of this research would include, among others, first : to develop and enhance the ability to think through the application of the theory in the can author. The second : to add to the knowledge of the author about the implementation of the programme of conversion of kerosene into a gas, as a consideration and input for relevant agencies and as reference material for those who want to do research with the same topic or problem.*

Keyword : *Policy, implementation of policies and kerosen.*

A. Latar Belakang

Populasi penduduk dunia yang semakin hari terus bertambah, menyebabkan kebutuhan akan sumber daya alam terutama minyak bumi semakin meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa waktu yang lalu masyarakat sering dihadapkan dengan masalah bahan bakar minyak (BBM). Negeri ini sendiri adalah penghasil minyak bumi, namun masalah kebutuhan rumah tangga yang sangat vital ini ternyata belum bisa dipecahkan. Kondisi ini sangat

memprihatinkan sehingga hampir setiap tahun terjadi krisis BBM. Program konversi minyak tanah ke gas LPG dipilih oleh pemerintah sebagai solusi agar masyarakat dan berhemat dalam pemakaian bahan bakar untuk sehari-hari. Hal ini disebabkan semakin melambungnya harga minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Melihat keadaan tersebut maka LPG (elpiji) lantas dipilih karena produksi dan potensi kandungannya masih cukup besar di Indonesia. Untuk konsumsi domestik

sudah lebih dari cukup sehingga sebagian masih bisa di ekspor, berdsarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi LPG (elpiji) lebih rendah daripada minyak tanah. Pemerintah dapat menghemat subsidi hingga Rp. 15 – Rp. 20 triliun jika program ini berhasil.

Landasan hukum pelaksanaan program ini yaitu :

1. Undang –undang nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2009 dimana didalamnya terdapat anggaran untuk subsidi LPG tabung 3 kg dengan volume sebesar 1.6 juta MT.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas Tabung 3 Kg (28 November 2007)
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (19 Desember 2007)
4. Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01.K/DJM.S/2009 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) dan penetapa Daerah Tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Dirjen Migas No. 13767.K/10/DJM/2008 tentang Penugasan Pertamina dan Penetapan Daerah Tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tahun 2008 (www.pertamina.com)

Adapun yang menjadi sasaran Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas LPG, yaitu :

1. Rumah Tangga
Rumah Tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi

persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Ibu Runmah Tangga
 - b. Pengguna Minyak Tanah murni
 - c. Kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
 - d. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat
2. Usaha Mikro
Usaha Mikro yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
 - a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya
 - b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau Surat Keterangan dari kelurahan setempat.
 - c. Melampirkan Surat Keterangan Usaha dari kelurahan setempat
 3. Apabila dalam distribusi LPG 3kg secara gratis kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga Atau Usaha Mikro)yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi sesuai kriteria berhak mendapatkan paket LPG 3kg secara gratis(contoh ; penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/KK/Surat Keterangan dari Kelurahan setempat), maka dapat diberikan paket LPG 3Kg dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau
 - b. Surat Keterangan dari RT/RW setempat, atau
 - c. Berita Acara serah terima distribusi antarakonsultan

dengan penerima paket dilampiri dengan fotocopy kartu identitas yang bersangkutan.

Sejak dimulainya program konversi, konsumsi LPG terus meningkat. Meningkatnya konsumsi terhadap bahan bakar gas LPG diikuti dengan upaya perbaikan kinerja maupun infrastruktur pendukung distribusi. Untuk itu, Pertamina mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur pendukungnya. Diantaranya pembangunan beberapa LPG Storage Terminal baik yang dilakukan oleh Pertamina maupun pihak ketiga sebagai mitra investasi.

Pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan penggunaan gas LPG ke masyarakat. Pengsosialisasian yang dilakukan pun berbagai macam dari pihak Pertamina sendiri yang datang dalam suatu kelurahan, dari media cetak dan juga media elektronik tetapi masyarakat yang masih memakai minyak tanah merasa ganjil untuk mengganti dengan menggunakan gas LPG, karena mereka sudah terbiasa menggunakan minyak tanah sehingga sangat sulit untuk mengubah kebiasaan dari dulu. Sementara subsidi minyak tanah dicabut, masyarakat seperti dipaksa untuk menggunakan LPG. Jika masyarakat di suruh memilih, mereka lebih memilih menggunakan minyak tanah dari pada LPG, karena adanya ketakutan dan rasa was-was memakai LPG.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Menurut Friederick dalam Nugroho (2009 : 83), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Menurut Nugroho (2009 : 85), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah

strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

2. Implementasi Kebijakan

Nugroho (2009 : 494), mendefinisikan implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Makna implementasi adalah :

- a. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya
- b. Tugas Implementasi adalah meningkatkan realisasi tujuan dengan hasil kegiatan pemerintah
- c. Meliputi kreasi tentang system pengiriman kebijakan didesain dengan cara khusus dan upaya dengan harapan mencapai tujuan khusus

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

George dalam Nogi (2003 : 2), berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantaranya pembuatan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah Undang-Undang legislatif, pengeluaran peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Jones dalam Sujianto (2008 :31), melihat masalah implementasi kebijakan dengan menekankan pada konsep efektivitas-efektivitas fungsional. Implementasi yang dimaksudkan mengoperasionalkan program.

Aktivitas pengorganisasian, maksudnya pembentukan kembali sumber daya, unit-unit dan metode agar program berjalan.

Untuk menjawab dua pertanyaan itu Edward III mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, menurutnya ada empat yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Komunikasi juga berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi/publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kazt dan Kahn dalam Sujianto (2008 :56) :

a). Komunikasi ke bawah

1. Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik, perintah kerja.
2. Informasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainnya, rasionalisasi pekerjaan.
3. Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur pengorganisasiannya.
4. Perintah-perintah
5. Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada para pelaksana program.

b). Komunikasi ke atas

Komunikasi keatas maksudnya informasi yang diminta oleh pihak manajemen dan informasi secara sukarela disampaikan oleh para pelaksana itu dapat berupa keluhan-keluhan, mungkin juga gagasan yang inovatif. Namun sangat

disayangkan bahwa informasi itu jarang sekali mengalir keatas secara efisien karena informasi itu dapat digunakan sebagai car kontrol bawahan kepada atasan.

c). Komunikasi mendatar/vertikal

Komunikasi ini sangat penting, karena akan ada suatu hubungan antara instansi terkait dalam pelaksanaan program. Banyak sekali instansi yang terkait, untuk itu perlu adanya komunikasi yang bersifat horizontal, sebab komunikasi yang mendatar ini akan membina koordinasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksudkan adalah jumlah staff pelaksana yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai artinya sesuai dengan yang dibutuhkan, adanya fasilitas yang mendukung kelancaranpelaksanaan proyek, dan pelimpahan wewenang dari atasan kepada pelaksana dilapangan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesedian dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi jauh dari efektif.

5. Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata program artinya rancangan mengenai azas serta usaha yang dilaksanakan. Program dapat dikatakan sebagai sebuah rencana yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan walaupun tidak semuanya bisa direalisasikan. Sebuah

program besar dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing –masing tindakan tersebut dalam rangka usaha untuk mencapai sasaran yang tepat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga dan masyarakat, dan lain sebagainya. Serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Kabag Depot Sales Point PT. Pertamina Pekanbaru, Sekretaris Lurah Tuah Karya, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Kelurahan Tuah Karya, 3 orang ketua RT dan RW yang berbeda, serta masyarakat penerima dan yang tidak menerima program konversi minyak tanah ke gas LPG.

D. Hasil

Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG merupakan program yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghemat bahan bakar bersubsidi melalui gas LPG yang dinilai lebih irit. Pertamina sebagai salah satu pihak yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG mengungkapkan bahwa : program konversi minyak tanah ke gas LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksesorinya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. Yang menjadi alat kerja

pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas, yaitu :

1. Survey

Survey yaitu menentukan area dan penerima (RT/UKM) yang layak menerima paket perdana tabung gas. Setelah survey akan dilakukan pencacahan atau mendata masyarakat yang akan menerima tabung gas.

Pada tahap survey, komunikasi sangat berperan penting. Konsultan/petugas sosialisasi perlu mengadakan koordinasi dengan RT atau RW setempat, guna dalam proses menentukan area dan penerima (RT/UKM) yang layak menerima paket perdana tabung gas, lebih tepat pada sasarannya. Pada indikator kesesuaian sasaran perlu upaya secara maksimal. Salah satu caranya dengan melakukan pendataan langsung kepada masyarakat oleh konsultan yang didampingi ketua RT/RW supaya didapat data-data yang valid sehingga dalam proses pembagian gas LPG masyarakat yang telah didata berhak menerima gas LPG.

“Masih ada warga yang tidak mendapatkan paket tabung gas 3 kg ini, padahal mereka benar-benar membutuhkan paket ini. Belum meratanya warga yang terdata menjadi kendala dan membutuhkan perhatian yang serius dari pihak yang mensurvey dan yang menentukan sasaran konversi ini supaya tujuan dari program itu sendiri dapat tercapai”

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyederhanaan informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pelaksana program) ke pihak

lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi harus terintegrasi dalam aktifitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk memungkinkan masyarakat menaggulangi masalah-masalah secara mandiri dan berkesinambungan.

3. Distribusi
Distribusi yaitu menyalurkan paket-paket perdana tabung gas kepada rumah tangga dan usaha mikro, dengan ketentuan :
 1. Membagikan gratis kepada masyarakat pengguna minyak tanah saran konversi berupa tabung LPG 3kg beserta isi perdana , kompor gas 1 tungku beserta aksesorisnya (SILANG, KLEM DAN REGULATOR)
 2. Distribusi LPG 3 Kg menggunakan jalur distribusi eks minyak tanah, yaitu agen dan pangkalan minyak tanah.
 3. Pelaksanaan konversi dengan membagikan paket konversi kepada masyarakat dilakukan bertahap dari satu kecamatan lainnya
4. Penarikan Minyak Tanah
Penerikan minyak tanah dilakukan didaerah yang telah selesai dicacah dan didistribusikan paket konversi. Penarikan ini dilakukan secara bertahap, guna memberikan kesempatan masyarakat pengguna untuk beradaptasi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas Di Kota Pekanbaru.

1. Komunikasi

Peran komunikasi sangat penting bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat persuasif edukatif dan informatif. Sebab tanpa komunikasi maka tidak adanya proses interaksi, saling tukar ilmu pengetahuan, pengalaman, pendidikan, persuasi, informasi, dan sebagainya.

2. Sumber Daya

Adapun sub indikator dari sumber daya yaitu :

- a. Adanya jumlah staf pelaksana yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan dan mempunyai keterampilan dan kemampuan yang memadai.
- b. Adanya fasilitas yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan program.
- c. Adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab kepada staf pelaksana lapangan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sub indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.
- b. Adanya arah respon para pelaksana untuk menerima atau menolak melaksanakan kebijakan.

- c. Adanya insentif atau rangsangan atasan kepada pelaksana lapangan.

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Sub indikatornya adalah:

- a. Adanya prosedur pengoperasian standar (SOP) yang dapat membantu organisasi atau lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Adanya pembagian tanggungjawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab III, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan didapatkan hasil bahwa Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas di Kota Pekanbaru (Studi kasus Kelurahan Tuah Karya) “ belum maksimal”. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan untuk melihat pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas di Kota Pekanbaru (studi kasus Kelurahan Tuah Karya), yaitu indikator tahap survey, sosialisasi, distribusi, dan penarikan minyak tanah.
 - a. Pada tahap survey, pihak pelaksanaan tidak melibatkan pihak-pihak RT setempat, sehingga masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan paket tabungan gas, tetapi pada

kenyataannya di lapangan tetap di data dan mendapatkan dan mendapatkan paket perdana tabung gas.

- b. Pada tahap sosialisasi, kurangnya sosialisasi program konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan di Kelurahan Tuah Karya. Hal ini terlihat gas LPG pada sosialisasi yang hanya sekali dilakukan, yang seharusnya sosialisasi itu berulang-ulang dilakukan agar menumbuhkan pemahaman pada masyarakat tentang tata cara penggunaan paket tabung gas 3kg yang baik dan aman, sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk menggunakan tabung gas karena sudah mengetahui cara yang tepat dalam penggunaannya.
- c. Pada tahap distribusi, tidak semua warga mau memanfaatkan paket perdana pemberian pemerintah yang sudah didistribusikan. Hal ini disebabkan oleh rasa takut mereka lebih besar dari keinginan untuk beralih menggunakan GAS lpg.
- d. Pada tahap penarikan minyak tanah, walaupun subsidi minyak tanah telah ditarik dari pasaran, sehingga harganya sudah mahal, masyarakat tetap memilih menggunakan minyak tanah. Hal ini disebabkan oleh rasa takut masyarakat jika beralih menggunakan gas LPG dan susahnya mengubah kebiasaan lama yang turun temurun menggunakan minyak tanah untuk memasak

F. SARAN

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu mendapat

perhatian bagi pemerintah serta pihak pelaksana program konversi minyak tanah ke gas di kota Pekanbaru. Adapun saran – saran tersebut adalah sebagai berikut

1. Pemerintah lebih menekankan lagi seberapa penting tujuan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG baik manfaatnya, cara penggunaan yang aman melalui media cetak ataupun elektronik.
2. Sebaiknya sosialisasi dilakukan secara terus menerus untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk berpindah ke gas dan masyarakat merasa aman menggunakannya.
3. Ketika sosialisasi dilakukan alangkah baiknya jika pelaksana program bekerja sama dengan pihak RT, RW dan masyarakat. Perbaikan sosialisasi dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti, Pemda, Instansi Pemerintah Wakil rakyat dan LSM.
4. Masyarakat tidak perlu takut atau was-was menggunakan tabung gas, jika menggunakan LPG sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konsultan dan petunjuk pada buku panduan, maka menggunakan LPG akan aman dan tidak akan ada kecelakaan.
5. Berita tentang banyaknya kasus ledakan LPG merupakan

ancaman bagi masyarakat. Untuk itu bagaimana kualitas LPG yang saat ini maupun yang akan beredar akan sangat lebih baik diperiksa kembali oleh pemerintah pihak pelaksana. Pembagian tabung, kompor mini dan aksesorisnya kepada masyarakat sebaiknya diperhatikan secara benar, sebab selang dan regulatornya ada yang tidak sesuai dengan standar SNI, sehingga masyarakat yang menggunakan kompor gas tersebut bisa bisa menggantinya dengan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulWahab, Solichin. 2005. Analisa Kebijakan, Edisi 5. Jakarta. Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan . 2001. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik . Pekanbaru. Alaf Riau.
- Nogi, Hessel. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Balairung.
- Nogi, Hessel S. Tangkilisan 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Lukman Offset dan Yayasan Pembruan Administrasi Publik Indonesia.
- Nugroho, Riant, 2009. Publik Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.